



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KETUT GEDE MUDIARTA
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 741859

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.786.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m²/120 m² di BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/65 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m² di BULELENG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 210 m² di BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 52.500.000
5. Tanah Seluas 410 m² di BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.070.000
6. Tanah Seluas 3180 m² di BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 159.000.000
7. Tanah Seluas 3190 m² di BANGLI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.130.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 340.000.000

1. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.429.508.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.746.208.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.746.208.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENING KARTIKA SRI REJEKI S
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 487171

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/120 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 192.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NEW JUPITER MX 135 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 150 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, YAMAHA 2DP-R AVT SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.556.520

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 849.556.520

III. HUTANG Rp. 61.396.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 788.159.720



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITIN PARLINA
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 134585

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 40.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/80 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, XENIA 1.3 R Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.190.850

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 248.940.850

III. HUTANG Rp. 210.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 38.940.850

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI RUSYADI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 411307

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 627.500.000

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 477.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

